

**IMPLEMENTASI PRINSIP AMANAH DALAM PENYALURAN BANTUAN
PANGAN BERAS PADA PERUM BULOG KANTOR CABANG KOLAKA**

Oleh:

Nur Asisah¹ Ristiyanti Ahmadul Marunta²

Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

Nurasisaah05@gmail.com¹, ristiyanti@usimar.ac.id²

ABSTRAK

Ketahanan pangan merupakan prioritas nasional yang menuntut distribusi bantuan secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Namun, penyaluran bantuan pangan beras masih terkendala ketidaktepatan sasaran, potensi manipulasi data, dan lemahnya pengawasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi prinsip amanah dalam penyaluran bantuan pangan beras pada Perum BULOG Kantor Cabang Kolaka dalam perspektif ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip amanah telah diimplementasikan melalui lima aspek utama: (1) kejujuran pengelolaan data berbasis DTSEN tanpa intervensi; (2) tanggung jawab melalui verifikasi digital NIK dan koordinat; (3) keadilan distribusi melalui koordinasi penggantian penerima tidak layak; (4) penjagaan kualitas dan kuantitas komoditas; serta (5) transparansi informasi lintas lembaga berbasis teknologi. Disimpulkan bahwa Perum BULOG Cabang Kolaka telah menerapkan prinsip amanah secara optimal, yang tercermin dalam aspek kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan akuntabilitas yang selaras dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

Kata Kunci: Prinsip Amanah, Bantuan Pangan beras, BULOG, Ekonomi Islam, Akuntabilitas

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional yang berperan strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.¹ ketahanan pangan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi melalui kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia harus tersedia secara cukup, aman, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Di Indonesia, beras merupakan komoditas pangan utama yang dikonsumsi oleh sebagian besar penduduk, sehingga ketersediaan dan distribusinya menjadi tanggung jawab penting pemerintah.² Berbagai kebijakan seperti pengendalian pasokan dan distribusi beras dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga serta mendukung ketahanan pangan nasional, termasuk melalui program bantuan pangan beras kepada masyarakat yang membutuhkan.

Program bantuan pangan beras merupakan instrumen kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat serta menjaga ketahanan sosial, khususnya bagi kelompok rentan. Dalam implementasinya, program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Perum BULOG sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan distribusi beras.³ Namun demikian, efektivitas penyaluran bantuan tidak hanya ditentukan oleh sistem yang digunakan, tetapi juga oleh integritas dan tanggung jawab para pelaksana di lapangan.⁴ masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan program bantuan pangan, seperti ketidaktepatan sasaran penerima dan keterlambatan penyaluran bantuan. Permasalahan lain seperti potensi manipulasi data serta lemahnya pengawasan distribusi turut mempengaruhi efektivitas program, sehingga menjadi tantangan yang perlu diperhatikan agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.⁵

Dalam praktiknya, pengelolaan data penerima bantuan pangan telah memanfaatkan sistem terintegrasi yang bersumber dari pemerintah pusat sebagai upaya meningkatkan

¹Saminem, S. (2025). Implementasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui Penyaluran Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Perum Bulog Cabang Sanggau di Kabupaten Sekadau Tahun 2023. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 5(1), 1-15.

²Kristiawan.(2022). Ketahanan Pangan.Penerbit NEM.

³Badan Pangan Nasional RI. (2022). Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan Tahun 2018–2022. Jakarta: Badan Pangan Nasional.

⁴Irawan, I., Subawa, Suprayitno, D., Suharyanto, Herlina, R. L., Ibrahim, H., dkk. (2024). Buku Ajar Manajemen Rantai Pasok. Sonpedia Publishing Indonesia.

⁵Ramdani, A., dkk. (2022). *Good Governance* dalam Pelayanan Publik. Bandung: Media Sains Indonesia.

transparansi dan akuntabilitas.pemanfaatan sistem berbasis teknologi dalam penyaluran bantuan sosial dapat meningkatkan transparansi serta akuntabilitas distribusi.⁶ Meskipun demikian, tantangan dalam memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan serta efektivitas pengawasan distribusi di tingkat pelaksanaan masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian lebih lanjut.permasalahan seperti ketidakakuratan data penerima, kurangnya transparansi, serta lemahnya pengawasan distribusi masih menjadi hambatan dalam mewujudkan penyaluran bantuan yang tepat sasaran.⁷ Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh sistem yang baik, tetapi juga oleh nilai-nilai yang mendasari pelaksanaannya.

Dalam konteks ekonomi syariah, prinsip amanah merupakan nilai fundamental yang harus diterapkan dalam setiap aktivitas pengelolaan dan distribusi sumber daya.amanah dalam perspektif ekonomi syariah mencerminkan nilai kejujuran, tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas yang diberikan.⁸ Dalam penyaluran bantuan pangan, penerapan prinsip ini menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak masyarakat serta upaya memastikan bantuan tepat sasaran. Oleh karena itu, setiap proses distribusi harus dilaksanakan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab untuk menghindari potensi penyimpangan dan ketidaktepatan sasaran.⁹ Penerapan prinsip amanah dalam pengelolaan dana sosial dapat meningkatkan kepercayaan publik serta memperkuat legitimasi lembaga dalam menjalankan fungsi distribusi kesejahteraan.¹⁰

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji mekanisme dan prosedur penyaluran bantuan pangan, kajian yang secara spesifik menyoroti implementasi prinsip amanah dalam ekonomi syariah di tingkat daerah masih relatif terbatas.penelitian mengenai penerapan prinsip amanah dalam pengelolaan bantuan sosial di tingkat lokal masih belum banyak dilakukan dan cenderung berfokus pada aspek administratif serta teknis penyaluran.¹¹ Dalam konteks Perusahaan Umum (Perum) BULOG Kantor Cabang

⁶Dwiyanto, A. (2021). Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik. UGM Press.

⁷Ariansyah, M., dkk. (2025). Analisis hambatan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan pemerintah: Studi kasus akurasi data dan pengawasan. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi*, 10(2), 88–104.

⁸Harmaini, dkk. (2024). Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep, Prinsip, dan Praktik. Jakarta: Universitas Trisakti.

⁹Irawan, F., Nilam Sari, M., Huda, M., Ilhamiwati, M., Parju, Anwar, D. R., Marunta, R. A., Fadli, M. D., Rizal, A., Rahmadi, Nurchayati, Junaedi, I. W. R., & Santoso, A. (2025). *Ekonomi Syariah: Teori & Aplikasi Ekonomi Islam*.

¹⁰Rahman, A., Dan Fauzi, M. (2024). Dampak penerapan prinsip amanah terhadap kepercayaan publik pada lembaga pengelola dana sosial. *Jurnal Manajemen dan Filantropi Islam*, 5(2), 134–150.

¹¹Aziz, M. A. (2024). Implementasi nilai etika dalam pengelolaan bantuan sosial di tingkat lokal: Tinjauan administratif dan teknis. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan Daerah*, 12(1), 30–45.

Kolaka, penelitian mengenai bagaimana nilai-nilai amanah diwujudkan dalam proses distribusi bantuan pangan beras juga belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kesenjangan tersebut sekaligus memberikan gambaran empiris mengenai penerapan etika Islam dalam memastikan bantuan tersalurkan secara jujur dan bertanggung jawab kepada pihak yang berhak. nilai amanah dalam tata kelola bantuan sosial tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga perlu diimplementasikan secara nyata untuk memperkuat akuntabilitas dan keadilan distribusi di masyarakat.¹²

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip amanah dalam penyaluran bantuan pangan beras pada Perusahaan Umum BULOG Kantor Cabang Kolaka. Analisis difokuskan pada aspek pengelolaan data penerima, mekanisme distribusi, pertanggungjawaban, serta jaminan kualitas bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ekonomi syariah, khususnya terkait penerapan nilai-nilai etika dalam pengelolaan program bantuan pemerintah.¹³ Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti amanah dan akuntabilitas dalam distribusi bantuan sosial memiliki peran penting dalam meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁴ integrasi nilai etika Islam dalam kebijakan ekonomi, termasuk distribusi bantuan, dapat memperkuat efektivitas program serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola. Oleh karena itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyaluran bantuan pangan di masa yang akan datang.¹⁵

Al-Qur'an juga menekankan pentingnya menunaikan amanat dan menegakkan keadilan dalam setiap aspek kehidupan sebagaimana firman Allah SWT (QS. An-Nisa' [4]: 58).

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

¹²Meliani, S. (2026). Tata kelola bantuan sosial berbasis nilai amanah: Memperkuat legitimasi dan keadilan distribusi. *Jurnal Etika dan Hukum Ekonomi*, 14(1), 15–32.

¹³Astuti, A. R. T. (2021). *Etika Bisnis Islam: Kasus-Kasus Kontemporer*. IAIN Parepare.

¹⁴Arus Jurnal Sosial dan Humaniora. (2025). Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Pendistribusian Raskin dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *AJSH: Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(1), 35-42.

¹⁵Jurnal Simki Economic. (2026). Implementasi Model Akuntansi Syariah berbasis Amanah dan Fund Accounting dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sosial. *Jurnal Simki Economic*, 9(2), 215-224.

Terjemahan:

"Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil (QS. An-Nisa' [4]: 58)."¹⁶

Ayat ini menjadi landasan utama penelitian ini. Perintah menunaikan amanat kepada yang berhak dan menegakkan keadilan secara langsung mencerminkan tanggung jawab Perum BULOG dalam mengelola dan menyalurkan bantuan pangan beras. Sebagai lembaga yang diamanahi oleh negara, BULOG wajib memastikan bahwa setiap proses distribusi dilaksanakan secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesuai dengan prinsip amanah dalam ekonomi Islam.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Perum BULOG Kantor Cabang Kolaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap fenomena di lapangan serta wawancara dengan informan kunci yang terlibat langsung dalam penyaluran bantuan pangan beras, yang didukung oleh studi pustaka yang relevan.

Data penelitian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan implementasi prinsip amanah dalam penyaluran bantuan pangan beras. Temuan lapangan kemudian dihubungkan dengan hasil wawancara dan studi pustaka guna melihat sejauh mana penerapan nilai-nilai amanah, seperti kejujuran, tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses distribusi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Amanah Dalam Pengelolaan Data Penerima Bantuan

Penyaluran bantuan pangan beras oleh pemerintah melalui Perum BULOG diperuntukkan bagi masyarakat yang tergolong kurang mampu dan rentan secara ekonomi. Program ini merupakan bagian dari kebijakan perlindungan sosial di bidang bantuan pangan beras yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin.¹⁷ Standar penerima bantuan pangan beras ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial berdasarkan data yang bersumber dari data terpadu sistem elektronik nasional sebagai

¹⁶Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi penyempurnaan 2019, (Jakarta: Lajnah pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisa' [4]: 58

¹⁷Badan Ketahanan Pangan & World Food Programme (WFP). (2020). Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia (FSVA) 2020. Kementerian Pertanian RI.

dasar penentuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).¹⁸ Sistem ini digunakan untuk mengintegrasikan dan memverifikasi data penerima bantuan secara digital guna memastikan ketepatan sasaran. Penerima bantuan adalah masyarakat yang terdaftar dalam data terpadu sistem elektronik nasional serta memenuhi kriteria kemiskinan yang telah ditetapkan, seperti rendahnya pendapatan, keterbatasan akses terhadap pangan, serta kondisi sosial ekonomi tertentu.¹⁹ Penetapan penerima sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, sedangkan Perum BULOG berperan sebagai pelaksana distribusi dan penyedia logistik beras, bukan sebagai pihak yang menentukan penerima bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Perum BULOG terkait syarat penerima bantuan pangan beras, maka diperoleh informasi bahwa pihak BULOG tidak memiliki kewenangan dalam menentukan atau mengubah data penerima bantuan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Pak Indra:

"Pihak BULOG tidak memiliki kewenangan dalam menentukan atau mengubah data penerima bantuan. Data penerima bersumber dari DTSEN (Data Terpadu Sistem Elektronik Nasional) yang digunakan oleh Kementerian Sosial. Dalam hal ini, BULOG hanya bertugas sebagai penyalur bantuan. Untuk menjaga keamanan dan mencegah manipulasi, sistem yang digunakan telah berbasis aplikasi dengan fitur barcode, sehingga data penerima lebih terkontrol dan tidak mudah disalah gunakan."²⁰



Gambar 1.1 Wawancara Bersama Pak Indra Salah Satu Pegawai bulog Kancab.Kolaka



Gambar 1.2 Penyaluran bantuan Pangan

¹⁸Khatimah, H. (2023). Evaluasi Kebijakan Perlindungan Sosial: Transformasi Program Rastra ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Jurnal Kebijakan Publik dan Pemerintahan, 5(2), 112-128.

¹⁹Hermawan, D. (2021). Kriteria dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam Penentuan Kelayakan Penerima Bantuan Sosial. Jurnal Administrasi dan Kesejahteraan Sosial, 9(1), 45-60.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Indra Pegawai Perum BULOG Kantor Cabang Kolaka 2026

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa BULOG menjalankan tugasnya sesuai dengan batas kewenangannya tanpa melakukan intervensi terhadap data yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Penggunaan teknologi berbasis barcode dan sistem DTSEN merupakan wujud nyata dari upaya menjaga integritas data penerima bantuan agar tidak terjadi manipulasi oleh pihak manapun.²¹

Dalam perspektif ekonomi Islam, sikap ini mencerminkan prinsip amanah, yaitu menjalankan tugas secara jujur dan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya. penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi bantuan sosial sejalan dengan prinsip amanah dalam ekonomi syariah yang menekankan kejujuran dan keadilan.²² transparansi dan keandalan sistem informasi dalam pengelolaan bantuan sosial menjadi faktor penting dalam menjaga integritas data serta mencegah terjadinya penyimpangan.²³ Penerapan prinsip amanah dan transparansi dalam pengelolaan dana publik merupakan cerminan dari tata kelola yang sesuai dengan perspektif ekonomi syariah.²⁴

2. Amanah Dalam Pertanggung Jawaban Penyaluran Bantuan

Pertanggung jawaban merupakan salah satu wujud nyata dari prinsip amanah dalam pengelolaan program bantuan sosial. Berdasarkan hasil wawancara, Pak Indra menjelaskan:

"Bentuk pertanggung jawaban BULOG dilakukan melalui sistem digital berbasis aplikasi bantuan pangan. Setiap proses penyaluran dilengkapi dengan dokumentasi penyerahan, pencatatan titik koordinat lokasi distribusi, serta verifikasi menggunakan identitas penerima (KTP/NIK). Kesalahan data sangat kecil kemungkinannya terjadi, kecuali jika terdapat penggantian penerima oleh pihak lain."²⁵

Al-Qur'an juga menekankan pentingnya menjaga amanat dan tidak berkhianat kepada Allah, Rasul, maupun sesama manusia, sebagaimana firman Allah SWT (QS. Al-Anfal [8]: 27):

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٧﴾

Terjemahan:

²¹Aprilia, N., Dan Hamzah, M. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas Distribusi Bantuan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, 6(1), 78-92.

²²Dhiyah. Amanah dalam Ajaran Islam. Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2024

²³Tim Penulis UIN Sumatera Utara. (2019). Etika Manajemen Perspektif Islam. UIN Sumatera Utara.

²⁴Chatra, M. A., Syamil, A., Subawa, Budaya, I., Munizu, M., Darmayanti, N. L., Fahmi, M. A., Dan dkk. (2023). Manajemen Rantai Pasok.

²⁵Hasil Wawancara dengan Indra Pegawai Perum BULOG Kantor Cabang Kolaka 2026

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui (QS. Al-Anfal [8]: 27)."²⁶

Ayat tersebut menjadi landasan pentingnya pertanggungjawaban dalam pengelolaan bantuan pangan. BULOG sebagai lembaga yang diamanahi pemerintah wajib menunaikan kepercayaan tersebut dengan sepenuh tanggung jawab, dan tidak boleh mengkhianati amanat yang telah diberikan, baik dalam bentuk manipulasi data maupun penyimpangan distribusi.

Mekanisme pertanggungjawaban berbasis digital ini memastikan bahwa seluruh proses penyaluran dapat diverifikasi dan ditelusuri kembali apabila diperlukan. Penggunaan sistem aplikasi digital yang dilengkapi bukti foto dan titik koordinat oleh BULOG merupakan bentuk konkret dari akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, akuntabilitas merupakan wujud tanggung jawab yang tidak hanya bersifat horizontal kepada sesama manusia, tetapi juga vertikal kepada Allah SWT. Penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sosial berbasis digital dapat memperkuat sistem pengawasan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola.²⁷ Akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pengelolaan dana, sehingga ketiga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan dalam memastikan pertanggungjawaban yang baik.²⁸

3. Amanah Dalam Menjaga Keadilan Distribusi

Keadilan distribusi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi Islam yang dikenal dengan istilah 'adl. Dalam praktiknya, BULOG Cabang Kolaka telah menerapkan mekanisme yang memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Indra:

"BULOG Cabang Kolaka melakukan koordinasi dengan pemerintah desa melalui petugas pelaksana di lapangan. Apabila terdapat kondisi tertentu, seperti penerima yang sudah meninggal dunia atau tidak memenuhi syarat, maka dilakukan penggantian berdasarkan data cadangan yang telah disediakan. Jika data cadangan juga tidak memenuhi kriteria, petugas dapat berkoordinasi dengan pihak desa untuk menentukan pengganti yang layak."²⁹

²⁶Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Anfal [8]: 27

²⁷Pratiwi Kurniati. (2020). Buku Ajar Teori Akuntansi Syariah. IAIN Pontianak.

²⁸Perum BULOG. (2021). Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Code of Corporate Governance) Perusahaan Umum (Perum) BULOG: Edisi 2021. Jakarta: Perum BULOG.

²⁹Hasil Wawancara dengan Indra Pegawai Perum BULOG Kantor Cabang Kolaka 2026

Al-Qur'an juga menekankan pentingnya menegakkan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pendistribusian hak kepada yang berhak, sebagaimana firman Allah SWT (QS. An-Nahl [16]: 90):

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۙ﴾³⁰

Terjemahan:

"Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat."³⁰

Ayat tersebut menjadi landasan pentingnya penerapan keadilan dalam penyaluran bantuan pangan. BULOG sebagai lembaga yang diamanahi oleh pemerintah wajib memastikan bahwa distribusi bantuan dilakukan secara adil dan tepat sasaran, sehingga bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Penerapan keadilan ini juga menuntut agar tidak terjadi penyimpangan, diskriminasi, maupun ketidaktepatan dalam penentuan penerima, sehingga prinsip amanah dapat terwujud secara optimal dalam setiap proses penyaluran bantuan.

Mekanisme penggantian penerima yang tidak layak ini menunjukkan komitmen BULOG dalam menjaga agar bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak. konsep keadilan dalam perspektif ekonomi Islam menekankan pemerataan hak secara proporsional kepada setiap individu yang membutuhkan, bukan sekadar pemerataan mekanis semata.³¹ koordinasi antara lembaga penyalur dan pemerintah daerah merupakan kunci keberhasilan distribusi bantuan yang berkeadilan dan tepat sasaran, karena pemerintah daerah memiliki pengetahuan lokal yang lebih baik mengenai kondisi riil masyarakat penerima.³²

4. Amanah Dalam Menjaga Kualitas Dan Kuantitas Beras

Prinsip amanah tidak hanya berkaitan dengan proses distribusi, tetapi juga mencakup tanggung jawab terhadap kualitas bantuan yang diberikan. Berdasarkan hasil wawancara, informan menyatakan:

³⁰Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nahl [16]: 90

³¹Chapra, M. U. (2021). *Islamic Economics: What It Is and How It Developed* (Reprint Edition). Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI).

³²Pratama, A., Dan Nugroho, S. (2024). Sinergi Lembaga Penyalur dan Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Distribusi Bantuan Tepat Sasaran. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 11(3), 210-225.

"Sebelum proses penyaluran, BULOG terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan. Selain itu, dilakukan pemeriksaan dan pengujian kualitas beras untuk memastikan bahwa beras yang disalurkan memenuhi standar kelayakan konsumsi."³³

Al-Qur'an juga menekankan pentingnya menjaga kejujuran dalam takaran dan timbangan serta melarang segala bentuk kecurangan dalam pemberian hak kepada orang lain, sebagaimana firman Allah SWT (QS. Al-Mutaffifin [83]: 1–3):

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ١ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ٢ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ٣

Terjemahan

"Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam takaran dan timbangan), (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, tetapi apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."³⁴

Ayat tersebut menjadi landasan pentingnya menjaga kejujuran dalam kualitas dan kuantitas bantuan pangan. BULOG sebagai lembaga yang diamanahi oleh pemerintah wajib memastikan bahwa beras yang disalurkan sesuai dengan standar mutu yang layak konsumsi serta jumlah yang telah ditetapkan. Hal ini menegaskan bahwa tidak boleh ada pengurangan takaran maupun penurunan kualitas, karena hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap amanah. Dengan demikian, setiap proses penyaluran harus dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab agar bantuan yang diberikan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat penerima.

Langkah pemeriksaan kualitas sebelum distribusi ini mencerminkan kesungguhan BULOG dalam menjaga mutu bantuan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, hal ini selaras dengan konsep *maslahah*, yakni segala upaya yang bertujuan mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi kehidupan manusia.³⁵ *maslahah* dalam ekonomi Islam menekankan pentingnya kebijakan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat serta mencegah potensi kerugian. Menjaga kualitas bantuan yang disalurkan kepada masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan yang baik dan bertanggung jawab.³⁶ Akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan yang diterapkan secara bersama-sama terbukti berdampak

³³Hasil Wawancara dengan Indra Pegawai Perum BULOG Kantor Cabang Kolaka 2026

³⁴Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Mutaffifin [83]: 1–3.

³⁵Dahlan, A. R., Dan Zahiruddin, A. (2023). Kemaslahatan Manusia Sumber Hukum Tertinggi dalam Islam (Teori Al-Maslahah Najm Al-Din Al-Tufi). Yogyakarta: PT Insan Cendekia Mandiri Group.

³⁶Nurwahidah, D., Judijanto, L., Mursyidah Zein, A. I., Muharni, Y., dkk. (2026). Ekonomi Syariah: Pengantar Ekonomi Islam. Sonpedia Publishing Indonesia.

signifikan terhadap kualitas pengelolaan program, sehingga ketiga aspek tersebut menjadi elemen penting dalam memastikan bantuan yang disalurkan benar-benar bermanfaat.³⁷

5. Amanah Dalam Transparansi Informasi Dan Sistem Pengawasan Penyaluran Bantuan

Transparansi informasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan prinsip amanah. Berdasarkan hasil wawancara, informan menjelaskan:

"BULOG melakukan koordinasi awal melalui berita acara koordinasi penyaluran yang melibatkan berbagai pihak, seperti BULOG, pemerintah daerah (khususnya Dinas Ketahanan Pangan), serta pihak pengangkut (GPL). Sebelum penyaluran dilakukan, informasi terkait jadwal dan pelaksanaan bantuan disampaikan kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, pemerintah daerah meneruskan informasi tersebut kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui jadwal dan mengikuti mekanisme antrean penyaluran."³⁸

Al-Qur'an juga menekankan pentingnya memelihara amanat-amanat dan menepati janjinya sebagai ciri orang-orang yang beriman, sebagaimana firman Allah SWT

(QS. Al-Mu'minun [23]: 8):

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝٨﴾

Terjemahan:

"Dan (sungguh beruntung) orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya (QS. Al-Mu'minun [23]: 8)."³⁹

Ayat ini relevan dengan sistem transparansi yang diterapkan BULOG, yaitu penggunaan teknologi digital berupa barcode, foto, titik koordinat, dan verifikasi NIK/KTP. Sistem tersebut merupakan wujud nyata dari "memelihara amanat", di mana BULOG memastikan tidak ada satu pun bantuan yang bocor, tidak tercatat, atau tidak tepat sasaran dalam setiap tahapan penyaluran.

Sistem koordinasi berlapis ini memastikan bahwa informasi mengalir secara terstruktur dari BULOG hingga ke tingkat masyarakat. Dengan adanya sistem pengawasan digital dan koordinasi lintas lembaga yang diterapkan BULOG, prinsip transparansi dan amanah terwujud secara nyata dalam pengelolaan program bantuan pangan. Penerapan sistem pengawasan berbasis digital serta koordinasi antar lembaga

³⁷Ulfa, A., Dan Rahmawati, D. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pengelolaan Program Bantuan Pemerintah. Jurnal Manajemen Pelayanan Publik, 8(2), 134-148.

³⁸Hasil Wawancara dengan Indra Pegawai Perum BULOG Kantor Cabang Kolaka 2026

³⁹Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Mu'minun [23]: 8

dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi bantuan sosial.⁴⁰ penguatan pengawasan dan transparansi data menjadi syarat utama dalam mewujudkan distribusi bantuan yang adil, tepat sasaran, dan berkelanjutan bagi masyarakat penerima manfaat.⁴¹

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Perum BULOG Kantor Cabang Kolaka telah mengimplementasikan prinsip amanah dalam penyaluran bantuan pangan beras secara konsisten melalui lima aspek utama. Pertama, dalam pengelolaan data penerima, BULOG tidak memiliki kewenangan mengubah data penerima bantuan yang bersumber dari DTSEN (Data Terpadu Sistem Elektronik Nasional) Kementerian Sosial, dan memanfaatkan sistem berbasis barcode untuk mencegah manipulasi data. Kedua, dalam pertanggungjawaban penyaluran, BULOG menerapkan sistem digital yang mencakup dokumentasi foto, pencatatan titik koordinat, serta verifikasi identitas penerima melalui KTP/NIK sebagai wujud akuntabilitas yang terukur. Ketiga, dalam menjaga keadilan distribusi, BULOG berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk memastikan penggantian penerima yang tidak layak dilakukan secara tepat sasaran sesuai prinsip ‘adl dalam ekonomi Islam. Keempat, dalam menjaga kualitas dan kuantitas beras, BULOG melakukan pemeriksaan dan pengujian mutu beras sebelum penyaluran sebagai cerminan konsep masalah, yaitu mendatangkan manfaat dan mencegah kemudharatan bagi masyarakat. Kelima, dalam transparansi informasi dan pengawasan, BULOG menerapkan sistem koordinasi berlapis bersama Dinas Ketahanan Pangan dan pemerintah daerah serta menggunakan teknologi digital dalam setiap tahapan penyaluran, sehingga informasi mengalir secara terstruktur hingga ke tingkat masyarakat. Secara keseluruhan, implementasi prinsip amanah di Perum BULOG Kantor Cabang Kolaka mencerminkan tata kelola yang sejalan dengan nilai-nilai ekonomi syariah, yaitu kejujuran, tanggung jawab, transparansi, dan keadilan dalam pengelolaan program bantuan sosial pemerintah.

⁴⁰Sari, K., Dan Putra, R. (2024). Pengawasan Berbasis Digital: Inovasi Transparansi Distribusi Bantuan Sosial di Era 4.0. *Jurnal Administrasi Digital Indonesia*, 5(4), 301-315.

⁴¹Agung Yulianto, *Ekonomi Syariah dan Keadilan Sosial*, (Yogyakarta: PT Penulis Cerdas Indonesia, 2025), hlm. 206.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Yulianto, *Ekonomi Syariah dan Keadilan Sosial*, (Yogyakarta: PT Penulis Cerdas Indonesia, 2025), hlm. 206.
- Aprilia, N., Dan Hamzah, M. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas Distribusi Bantuan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 6(1), 78-92.
- Ariansyah, M., dkk. (2025). Analisis hambatan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan pemerintah: Studi kasus akurasi data dan pengawasan. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi*, 10(2), 88–104.

- Arus Jurnal Sosial dan Humaniora. (2025). Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Pendistribusian Raskin dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *AJSH: Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(1), 35-42.
- Astuti, A. R. T. (2021). *Etika Bisnis Islam: Kasus-Kasus Kontemporer*. IAIN Parepare.
- Aziz, M. A. (2024). Implementasi nilai etika dalam pengelolaan bantuan sosial di tingkat lokal: Tinjauan administratif dan teknis. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan Daerah*, 12(1), 30–45.
- Badan Pangan Nasional RI. (2022). *Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan Tahun 2018–2022*. Jakarta: Badan Pangan Nasional.
- Badan Ketahanan Pangan & World Food Programme (WFP). (2020). *Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia (FSVA) 2020*. Kementerian Pertanian RI.
- Chapra, M. U. (2021). *Islamic Economics: What It Is and How It Developed (Reprint Edition)*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Chatra, M. A., Syamil, A., Subawa, Budaya, I., Munizu, M., Darmayanti, N. L., Fahmi, M. A., Dan dkk. (2023). *Manajemen Rantai Pasok*.
- Dahlan, A. R., & Zahiruddin, A. (2023). *Kemaslahatan Manusia Sumber Hukum Tertinggi dalam Islam (Teori Al-Maslahah Najm Al-Din Al-Tufi)*. Yogyakarta: PT Insan Cendekia Mandiri Group.
- Dhiyah. Amanah dalam Ajaran Islam. Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2024
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. UGM Press.
- Huda, N., Dan Nasution, M. E. (2023). *Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik Akuntabilitas*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda, N., Dan Nasution, M. E. (2023). *Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik Akuntabilitas*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hermawan, D. (2021). Kriteria dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam Penentuan Kelayakan Penerima Bantuan Sosial. *Jurnal Administrasi dan Kesejahteraan Sosial*, 9(1), 45-60.
- Harmaini, dkk. (2024). *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep, Prinsip, dan Praktik*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Irawan, F., Nilam Sari, M., Huda, M., Ilhamiwati, M., Parju, Anwar, D. R., Marunta, R. A., Fadli, M. D., Rizal, A., Rahmadi, Nurchayati, Junaedi, I. W. R., & Santoso, A. (2025). *Ekonomi Syariah: Teori & Aplikasi Ekonomi Islam*.
- Irawan, I., Subawa, Suprayitno, D., Suharyanto, Herlina, R. L., Ibrahim, H., dkk. (2024). *Buku Ajar Manajemen Rantai Pasok*. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Jurnal Simki Economic. (2026). Implementasi Model Akuntansi Syariah berbasis Amanah dan Fund Accounting dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sosial. *Jurnal Simki Economic*, 9(2), 215-224.
- Kristiawan.(2022). Ketahanan Pangan.Penerbit NEM
- Khatimah, H. (2023). Evaluasi Kebijakan Perlindungan Sosial: Transformasi Program Rastha ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). *Jurnal Kebijakan Publik dan Pemerintahan*, 5(2), 112-128.
- Meliani, S. (2026). Tata kelola bantuan sosial berbasis nilai amanah: Memperkuat legitimasi dan keadilan distribusi. *Jurnal Etika dan Hukum Ekonomi*, 14(1), 15–32.
- Nurwahidah, D., Judijanto, L., Mursyidah Zein, A. I., Muharni, Y., dkk. (2026). *Ekonomi Syariah: Pengantar Ekonomi Islam*. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Pratiwi Kurniati. (2020). *Buku Ajar Teori Akuntansi Syariah*. IAIN Pontianak.
- Perum BULOG. (2021). *Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Code of Corporate Governance) Perusahaan Umum (Perum) BULOG: Edisi 2021*. Jakarta: Perum BULOG.
- Pratama, A., Dan Nugroho, S. (2024). Sinergi Lembaga Penyalur dan Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Distribusi Bantuan Tepat Sasaran. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 11(3), 210-225.
- Pratama, A., Dan Nugroho, S. (2024). Sinergi Lembaga Penyalur dan Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Distribusi Bantuan Tepat Sasaran. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 11(3), 210-225.
- Ramdani, A., dkk. (2022). *Good Governance dalam Pelayanan Publik*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Rahman, A., Dan Fauzi, M. (2024). Dampak penerapan prinsip amanah terhadap kepercayaan publik pada lembaga pengelola dana sosial. *Jurnal Manajemen dan Filantropi Islam*, 5(2), 134–150.
- Saminem, S. (2025). Implementasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui Penyaluran Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Perum Bulog Cabang Sanggau di Kabupaten Sekadau Tahun 2023. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 5(1), 1-15.
- Sari, K., & Putra, R. (2024). Pengawasan Berbasis Digital: Inovasi Transparansi Distribusi Bantuan Sosial di Era 4.0. *Jurnal Administrasi Digital Indonesia*, 5(4), 301-315.
- Tim Penulis UIN Sumatera Utara. (2019). *Etika Manajemen Perspektif Islam*. UIN Sumatera Utara.
- Ulfa, A., Dan Rahmawati, D. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pengelolaan Program Bantuan Pemerintah. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 8(2), 134-148.